
**EFEK HOAKS DAN DISINFORMASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIH
DALAM PEMILU DI KOTA MANADO**

Yurnie Sendow¹, Efvendi Robbi Sondakh², Juliana W Tumiwa³

^{1,2,3}Fisip Unsrat

yurniesendow@gmail.com¹, efvendysondakh@unsrat.ac.id², julianatumiwa@unsrat.ac.id³

Abstrak

Pemanfaatan media sosial sebagai ruang komunikasi politik telah mengubah pola penyebaran informasi dalam proses demokrasi. Di sisi lain, perkembangan tersebut diikuti dengan meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memengaruhi perilaku politik masyarakat, terutama menjelang penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hoaks dan disinformasi terhadap keputusan pemilih dalam Pemilu di Kota Manado, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan pemilih terhadap informasi palsu, serta merumuskan strategi penguatan literasi digital sebagai upaya mitigasi. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan survei kuantitatif, wawancara mendalam, analisis media sosial, serta studi dokumentasi sehingga mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan kecenderungan perilaku responden dan analisis tematik untuk menginterpretasikan hasil wawancara serta dinamika penyebaran informasi di media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, khususnya WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram, merupakan saluran utama penyebaran hoaks politik. Paparan informasi palsu yang berlangsung secara berulang terbukti memengaruhi persepsi, sikap emosional, serta preferensi politik sebagian pemilih. Tingkat literasi digital, tingkat pendidikan, usia, serta kepercayaan terhadap tokoh masyarakat menjadi faktor yang menentukan tingkat kerentanan seseorang terhadap disinformasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa karakteristik masyarakat Kota Manado yang memiliki hubungan sosial berbasis komunitas mempercepat proses penyebaran informasi, baik yang bersifat faktual maupun manipulatif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model hubungan antara paparan hoaks, literasi digital, kepercayaan terhadap opinion leader, dan keputusan pemilih dalam konteks demokrasi lokal. Temuan tersebut memberikan implikasi akademik bagi pengembangan kajian komunikasi politik digital serta implikasi praktis bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, media, dan lembaga pendidikan dalam menyusun strategi peningkatan literasi digital, mekanisme klarifikasi informasi, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap disinformasi politik guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.

Kata Kunci: Hoaks, Disinformasi, Keputusan Pemilih, Literasi Digital, Komunikasi Politik.

Abstract

The use of social media as a space for political communication has transformed information dissemination patterns within the democratic process. However, this development has been accompanied by a rise in hoaxes and disinformation, which have the potential to influence public political behavior, particularly in the lead-up to elections. This study aims to analyze the impact of hoaxes and disinformation on voter decisions in Manado City elections, identify factors contributing to voter vulnerability to false information, and formulate strategies to enhance digital literacy as a mitigation measure. A mixed-methods approach was employed, combining quantitative surveys, in-depth interviews, social media analysis, and document studies to provide a comprehensive overview of the phenomenon. Data were analyzed using descriptive statistics to outline respondent behavioral trends and thematic analysis to interpret interview results and the dynamics of information dissemination across digital media. The findings indicate that social media platforms—specifically WhatsApp, Facebook, TikTok, and Instagram—serve as primary channels for the spread of political hoaxes. Repeated exposure to false information was found to influence the perceptions, emotional attitudes, and political preferences of some voters. Factors determining an individual's vulnerability to disinformation include digital literacy levels, education, age, and trust in community figures. The study also reveals that the social characteristics of Manado City residents—specifically their community-based social ties—accelerate the spread of information, whether factual or manipulative. The research makes a significant contribution by developing a model illustrating the relationships between hoax exposure, digital literacy, trust in opinion leaders, and voter decisions within the context of local democracy. These findings offer academic implications for the advancement of digital political communication studies, as well as practical implications for local governments, election organizers, media outlets, and educational institutions. They provide a basis for formulating strategies to improve digital literacy, establish information verification mechanisms, and strengthen public resilience against political disinformation, thereby supporting the conduct of democratic, fair, and high-integrity elections.

Keywords: *Hoaxes, Disinformation, Voter Decisions, Digital Literacy, Political Communication.*

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap praktik komunikasi politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan internet yang diikuti dengan meningkatnya penggunaan media sosial menjadikan masyarakat tidak lagi sekadar sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen sekaligus penyebar informasi politik. Kondisi tersebut memberikan ruang yang luas bagi pertukaran gagasan, peningkatan partisipasi politik masyarakat, serta penguatan demokrasi digital. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang semakin sulit dikendalikan.

Fenomena penyebaran hoaks dalam kontestasi politik menjadi perhatian berbagai kalangan akademisi karena memiliki konsekuensi yang serius terhadap kualitas demokrasi. Informasi yang tidak akurat dapat membentuk persepsi publik yang keliru, meningkatkan polarisasi politik, memperkuat sentimen identitas, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Wardle dan Derakhshan (2017) menjelaskan bahwa information disorder berkembang melalui interaksi antara misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang secara sistematis mampu memengaruhi perilaku sosial maupun politik masyarakat. Sementara itu, Vosoughi et al. (2018) membuktikan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang benar karena memiliki daya tarik emosional yang lebih tinggi.

Dalam konteks Indonesia, tingginya penetrasi internet menyebabkan media sosial menjadi salah satu sumber utama informasi politik masyarakat. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memperoleh informasi politik melalui media digital, terutama Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Kemudahan distribusi informasi tersebut di satu sisi memperluas ruang partisipasi politik, tetapi di sisi lain meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu yang sulit diverifikasi.

Kondisi tersebut semakin terlihat menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Kompetisi politik yang semakin ketat mendorong berbagai aktor memanfaatkan media sosial sebagai instrumen kampanye sekaligus arena pembentukan opini publik. Informasi yang disampaikan tidak selalu berorientasi pada fakta, tetapi sering kali dikemas secara manipulatif melalui narasi emosional, propaganda, framing negatif, maupun penyebaran konten yang menyesatkan. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan membedakan informasi yang kredibel dengan informasi yang sengaja diproduksi untuk memengaruhi preferensi politik.

Kota Manado merupakan salah satu daerah dengan tingkat penetrasi internet dan penggunaan media sosial yang tinggi sehingga menjadi wilayah yang sangat relevan untuk mengkaji fenomena tersebut. Karakteristik masyarakat yang heterogen, tingginya aktivitas komunikasi digital, serta kuatnya hubungan sosial berbasis komunitas menyebabkan informasi politik menyebar dengan sangat cepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Manado secara rutin menerima berbagai informasi politik melalui media sosial, khususnya WhatsApp, Facebook, dan TikTok, yang sebagian di antaranya merupakan informasi yang

belum terverifikasi.

Paparan hoaks secara berulang tidak hanya memengaruhi pengetahuan politik masyarakat, tetapi juga membentuk sikap emosional terhadap kandidat tertentu. Dalam perspektif Agenda Setting Theory (McCombs & Shaw, 1972), media memiliki kemampuan menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat melalui intensitas pemberitaan. Pada era media sosial, fungsi tersebut tidak lagi didominasi media massa, melainkan diperkuat oleh algoritma platform digital yang terus merekomendasikan informasi sesuai preferensi pengguna. Akibatnya, masyarakat lebih sering menerima informasi yang memperkuat keyakinannya dibandingkan informasi yang bersifat objektif.

Selain agenda setting, Framing Theory (Entman, 1993) menjelaskan bahwa informasi politik tidak hanya disampaikan, tetapi juga dikonstruksi melalui sudut pandang tertentu sehingga mampu memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu. Dalam konteks hoaks politik, framing dilakukan melalui manipulasi narasi, penggunaan simbol, pemotongan konteks, hingga penyebaran gambar atau video yang telah dimodifikasi sehingga menghasilkan persepsi negatif terhadap kandidat tertentu.

Teori Two-Step Flow of Communication (Lazarsfeld et al., 1948) juga menjelaskan bahwa pengaruh media tidak selalu diterima secara langsung oleh masyarakat, tetapi melalui opinion leader yang dipercaya dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat Kota Manado, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, dan influencer lokal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini politik masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan kepada opinion leader sering kali lebih menentukan dibandingkan tingkat akurasi informasi yang disampaikan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara hoaks dan perilaku politik. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada skala nasional atau hanya mengukur tingkat penyebaran informasi palsu tanpa menjelaskan mekanisme bagaimana hoaks memengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih dalam konteks sosial lokal. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan aspek literasi digital, karakteristik sosial masyarakat, kepercayaan terhadap opinion leader, dan perilaku memilih pada tingkat daerah masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih minimnya kajian empiris yang menjelaskan hubungan antara paparan hoaks, literasi digital, karakteristik

sosial masyarakat, serta kepercayaan terhadap tokoh lokal dalam membentuk keputusan politik pemilih pada tingkat lokal. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya memusatkan perhatian pada frekuensi penyebaran hoaks atau perilaku pengguna media sosial, tanpa mengkaji secara komprehensif bagaimana dinamika komunikasi berbasis komunitas memengaruhi proses pengambilan keputusan politik.

Novelty penelitian ini adalah pengembangan model analitis yang menghubungkan empat dimensi utama, yaitu intensitas paparan hoaks, tingkat literasi digital, kepercayaan terhadap opinion leader, dan karakteristik komunikasi sosial masyarakat dalam menjelaskan keputusan pemilih di Kota Manado. Model tersebut memberikan perspektif baru bahwa efek hoaks tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik media digital, tetapi juga oleh budaya komunikasi lokal yang berbasis kepercayaan sosial dan kedekatan komunitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hoaks dan disinformasi terhadap keputusan pemilih dalam Pemilu di Kota Manado, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan masyarakat terhadap informasi palsu, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis penguatan literasi digital guna meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (metode campuran) dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Creswell & Plano Clark, 2018). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh hoaks dan disinformasi terhadap keputusan pemilih, baik melalui pengukuran hubungan antarvariabel maupun eksplorasi pengalaman, persepsi, dan perilaku pemilih dalam konteks Pemilu di Kota Manado. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tingkat paparan hoaks serta pengaruhnya terhadap perilaku memilih, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor sosial, budaya, dan komunikasi yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan desain penelitian yang terdapat pada laporan penelitian.

Desain Penelitian

Penelitian menerapkan desain explanatory sequential mixed methods, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang dilanjutkan dengan pendalaman data melalui wawancara

mendalam. Desain ini memungkinkan hasil survei dijelaskan lebih komprehensif melalui pengalaman para informan mengenai proses penerimaan, interpretasi, dan penyebaran informasi politik di media sosial.

Secara konseptual, penelitian memandang keputusan pemilih sebagai variabel yang dipengaruhi oleh intensitas paparan hoaks, tingkat literasi digital, karakteristik sosial-demografis, serta tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi politik. Hubungan antarvariabel tersebut dianalisis dengan memadukan hasil survei, wawancara, analisis media sosial, dan studi dokumentasi sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih mendalam.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Kota Manado memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi.
2. Media sosial menjadi sumber utama informasi politik masyarakat.
3. Tingginya partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.
4. Karakteristik masyarakat yang heterogen memungkinkan ditemukannya variasi perilaku pemilih terhadap informasi politik digital.

Selain itu, karakteristik sosial masyarakat yang masih mempertahankan hubungan kekeluargaan dan komunitas yang kuat menjadikan Kota Manado sebagai laboratorium sosial yang menarik dalam mengkaji penyebaran hoaks politik.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Kota Manado yang telah memiliki hak pilih pada penyelenggaraan pemilu. Pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan:

1. jenis kelamin;
2. kelompok usia;
3. tingkat pendidikan;
4. wilayah kecamatan; dan
5. intensitas penggunaan media sosial.

Teknik ini dipilih untuk memperoleh representasi yang proporsional terhadap karakteristik pemilih di Kota Manado. Jumlah responden survei berkisar antara 400–600 orang, sedangkan penelitian kualitatif melibatkan 15–20 informan kunci yang terdiri atas:

- penyelenggara pemilu;
- akademisi;
- tokoh masyarakat;
- tokoh agama;
- pegiat literasi digital;
- jurnalis; dan
- pemilih dari berbagai kelompok usia.

Komposisi tersebut memungkinkan diperolehnya perspektif yang beragam mengenai dinamika penyebaran hoaks selama tahapan pemilu.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan empat teknik pengumpulan data yang saling melengkapi.

1. Pertama, survei dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator paparan hoaks, tingkat kepercayaan terhadap informasi politik, literasi digital, penggunaan media sosial, dan perilaku memilih. Seluruh instrumen diuji validitas isi melalui expert judgement dan diuji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha.
2. Kedua, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih secara purposif. Wawancara bertujuan menggali pengalaman responden mengenai bentuk hoaks yang sering diterima, cara memverifikasi informasi, faktor yang memengaruhi kepercayaan terhadap informasi politik, serta perubahan preferensi politik akibat paparan disinformasi.
3. Ketiga, analisis media sosial dilakukan terhadap berbagai platform digital yang paling banyak digunakan masyarakat Kota Manado, yaitu Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan YouTube. Analisis difokuskan pada pola penyebaran informasi, karakteristik konten hoaks, aktor penyebar informasi, serta bentuk interaksi pengguna.
4. Keempat, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi yang berasal dari KPU, Bawaslu, Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Digital, laporan

pemeriksa fakta, serta berbagai publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hoaks politik dan demokrasi digital.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai karakteristik data yang diperoleh.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan paparan hoaks. Selanjutnya dilakukan analisis inferensial menggunakan regresi logistik untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap keputusan pemilih. Data kualitatif dianalisis menggunakan Thematic Analysis sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2021). Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, pemberian kode (coding), kategorisasi, identifikasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, analisis media sosial dilakukan melalui pendekatan Social Network Analysis (SNA) dan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola penyebaran informasi politik, hubungan antaraktor, serta karakteristik penyebaran hoaks selama masa kampanye.

Keabsahan Data

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan beberapa strategi, yaitu:

- triangulasi metode melalui kombinasi survei, wawancara, analisis media sosial, dan dokumentasi;
- triangulasi sumber melalui informan yang berasal dari berbagai latar belakang;
- member checking kepada beberapa informan utama;
- peer debriefing dengan sesama peneliti; dan
- audit trail terhadap seluruh proses pengumpulan dan analisis data.

Penerapan strategi tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian sehingga memenuhi standar penelitian ilmiah dalam bidang ilmu sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Hoaks dan Disinformasi terhadap Keputusan Pemilih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang menyesatkan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen komunikasi

politik yang mampu membentuk persepsi, sikap, dan perilaku politik masyarakat. Dalam konteks Pemilu di Kota Manado, penyebaran hoaks terjadi secara intensif melalui media sosial, terutama WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram, yang menjadi sumber utama informasi politik masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar informan mengaku menerima berbagai informasi politik yang belum dapat dipastikan kebenarannya selama masa kampanye, mulai dari isu korupsi, manipulasi foto dan video, narasi identitas, hingga tuduhan terhadap kandidat tertentu. Pola penyebaran informasi tersebut sesuai dengan karakteristik masyarakat digital yang memiliki tingkat konektivitas tinggi sehingga memungkinkan informasi beredar secara cepat tanpa melalui mekanisme verifikasi yang memadai.

Secara kualitatif, pengaruh hoaks terhadap keputusan pemilih berlangsung melalui proses psikologis yang bertahap. Informasi yang pada awalnya hanya dianggap sebagai isu atau rumor, setelah diterima secara berulang dari berbagai sumber, mulai membentuk persepsi mengenai karakter maupun kapasitas kandidat. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak langsung mempercayai informasi tersebut, namun intensitas penyebaran yang tinggi menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas kandidat yang menjadi sasaran pemberitaan negatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efek hoaks tidak selalu menghasilkan perubahan pilihan politik secara instan, tetapi lebih banyak membentuk keraguan (*political uncertainty*) yang kemudian memengaruhi proses evaluasi politik individu sebelum menentukan pilihan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan memilih bukan semata-mata dipengaruhi oleh program kerja atau rekam jejak kandidat, melainkan juga dipengaruhi oleh konstruksi informasi yang berkembang di ruang digital. Dalam perspektif psikologi politik, kondisi tersebut memperlihatkan munculnya *confirmation bias*, yaitu kecenderungan individu menerima informasi yang sejalan dengan keyakinan politik yang telah dimiliki sebelumnya dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Ketika hoaks dikemas sesuai preferensi politik kelompok tertentu, informasi tersebut menjadi lebih mudah diterima karena memperkuat identitas politik yang telah terbentuk.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan adanya *illusory truth effect*, yaitu kecenderungan seseorang mempercayai suatu informasi hanya karena informasi tersebut diterima secara berulang-ulang. Dalam situasi kompetisi politik yang sangat dinamis, pengulangan narasi melalui berbagai akun media sosial menciptakan persepsi seolah-olah

informasi tersebut merupakan fakta yang telah dikonfirmasi banyak pihak. Dengan demikian, kekuatan utama hoaks bukan terletak pada validitas informasi, melainkan pada intensitas reproduksi pesan dalam ruang digital.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pengaruh hoaks terhadap keputusan pemilihan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi kognitif, yaitu perubahan cara masyarakat memahami kandidat maupun isu politik tertentu. Kedua, dimensi afektif, yaitu munculnya emosi berupa ketakutan, kemarahan, kebencian, ataupun simpati terhadap kandidat tertentu akibat narasi yang dibangun melalui media sosial. Ketiga, dimensi konatif, yaitu kecenderungan individu mengubah preferensi politik, mengalihkan dukungan kepada kandidat lain, atau bahkan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa efek hoaks tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi, tetapi telah memengaruhi keseluruhan proses pembentukan perilaku politik masyarakat.

B. Literasi Digital sebagai Faktor Moderasi dalam Pengambilan Keputusan Politik

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa tingkat literasi digital berperan sebagai faktor moderasi yang menentukan sejauh mana paparan hoaks dapat memengaruhi keputusan politik masyarakat. Literasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, memverifikasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis sebelum mengambil keputusan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung melakukan verifikasi informasi melalui media resmi, portal berita kredibel, maupun layanan pemeriksa fakta sebelum mempercayai suatu informasi politik. Sebaliknya, responden yang memiliki kemampuan literasi digital lebih rendah cenderung menerima informasi secara langsung berdasarkan kepercayaan terhadap pengirim pesan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap sumber maupun validitas isi informasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerentanan terhadap hoaks lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam mengelola informasi dibandingkan dengan intensitas penggunaan media sosial semata.

Dalam konteks Kota Manado, literasi digital juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial masyarakat yang masih mengedepankan hubungan interpersonal. Informasi yang berasal dari

anggota keluarga, tokoh agama, atau pemimpin komunitas sering kali dianggap lebih kredibel dibandingkan informasi yang berasal dari media massa. Akibatnya, proses verifikasi informasi sering kali diabaikan karena masyarakat lebih mengandalkan hubungan kepercayaan daripada evaluasi terhadap isi informasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa literasi digital berfungsi sebagai mekanisme protektif terhadap penyebaran disinformasi. Individu yang memiliki kemampuan literasi digital tinggi cenderung mampu mengenali karakteristik hoaks, memahami teknik manipulasi informasi, membandingkan berbagai sumber informasi, serta mengidentifikasi motif politik di balik penyebaran suatu konten. Sebaliknya, rendahnya literasi digital menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat emosional, provokatif, dan sensasional.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital tidak cukup dilakukan melalui pelatihan penggunaan teknologi, tetapi harus diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis (*critical digital literacy*), evaluasi informasi (*information evaluation skills*), serta penguatan etika komunikasi digital (*digital citizenship*). Dengan demikian, literasi digital menjadi strategi preventif yang jauh lebih efektif dibandingkan hanya melakukan klarifikasi terhadap hoaks yang telah terlanjur menyebar.

C. Peran Opinion Leader dalam Komunikasi Politik Lokal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh informasi politik di Kota Manado tidak sepenuhnya dibentuk oleh media sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh keberadaan opinion leader dalam lingkungan sosial masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta figur publik lokal memiliki posisi strategis dalam membentuk opini masyarakat mengenai isu-isu politik yang berkembang.

Karakteristik sosial masyarakat Manado yang masih menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan, solidaritas komunitas, dan kepercayaan interpersonal menyebabkan informasi yang disampaikan oleh figur yang dihormati lebih mudah diterima dibandingkan informasi yang berasal dari media formal. Dalam kondisi demikian, legitimasi pesan lebih banyak ditentukan oleh siapa yang menyampaikan informasi daripada isi informasi itu sendiri.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengaku lebih percaya terhadap informasi politik yang disampaikan oleh tokoh agama atau pemimpin komunitas dibandingkan informasi yang diperoleh langsung melalui media sosial. Kondisi tersebut

memperlihatkan bahwa opinion leader berfungsi sebagai filter sekaligus amplifier dalam proses komunikasi politik. Apabila figur yang dipercaya menyampaikan informasi yang telah diverifikasi, maka penyebaran hoaks dapat ditekan. Sebaliknya, apabila opinion leader turut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, maka tingkat penyebaran disinformasi akan meningkat secara signifikan.

Dalam konteks ini, opinion leader memiliki dua fungsi strategis. Pertama, sebagai agen edukasi yang mampu meningkatkan literasi politik masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat. Kedua, sebagai agen mitigasi yang berperan melakukan klarifikasi terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat dalam program literasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan informasi masyarakat.

D. Analisis Berdasarkan Teori Agenda Setting, Framing, dan Two-Step Flow of Communication

Temuan penelitian dapat dijelaskan melalui tiga perspektif teori komunikasi politik yang saling melengkapi.

1. Pertama, Teori Agenda Setting (McCombs & Shaw, 1972) menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat melalui intensitas pemberitaan. Dalam era media sosial, fungsi ini tidak hanya dijalankan oleh media massa, tetapi juga oleh algoritma platform digital yang mengutamakan konten dengan tingkat interaksi tinggi. Akibatnya, isu yang terus-menerus muncul pada linimasa pengguna menjadi agenda utama dalam diskursus politik, terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa narasi mengenai dugaan korupsi, politik identitas, serta integritas kandidat menjadi topik yang paling sering muncul selama masa kampanye sehingga membentuk persepsi publik terhadap kandidat tertentu.
2. Kedua, Teori Framing (Entman, 1993) menjelaskan bahwa media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai realitas melalui proses seleksi, penonjolan, dan interpretasi fakta. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hoaks sering dikonstruksi melalui penggunaan bahasa yang emosional, pemotongan konteks, manipulasi visual, dan penyajian informasi yang bersifat parsial. Teknik framing tersebut

menghasilkan interpretasi tertentu yang mengarahkan masyarakat untuk memandang seorang kandidat sebagai sosok yang negatif ataupun tidak layak dipilih. Dengan demikian, kekuatan hoaks terletak pada kemampuannya membangun makna sosial, bukan semata-mata pada isi informasi.

3. Ketiga, Teori Two-Step Flow of Communication (Lazarsfeld et al., 1948) menjelaskan bahwa pengaruh media berlangsung melalui perantara opinion leader. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa proses komunikasi politik di Kota Manado masih sangat dipengaruhi oleh figur-figur yang memiliki legitimasi sosial. Informasi yang diterima melalui media sosial sering kali baru dipercaya setelah memperoleh penguatan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemimpin komunitas. Dengan demikian, hubungan antara media digital dan perilaku memilih tidak berlangsung secara langsung, tetapi dimediasi oleh struktur sosial lokal yang berbasis kepercayaan.

Integrasi ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa efek hoaks merupakan hasil interaksi antara paparan media digital, konstruksi pesan, dan dinamika komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada pengendalian konten digital tidak cukup efektif tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian komunikasi politik dengan menunjukkan bahwa pengaruh hoaks terhadap keputusan pemilih tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan media digital, tetapi harus dipahami sebagai hasil interaksi antara teknologi komunikasi, literasi digital, budaya lokal, dan jaringan kepercayaan sosial. Model konseptual yang dihasilkan memperlihatkan bahwa literasi digital berperan sebagai variabel moderasi, sedangkan opinion leader berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara paparan hoaks dan keputusan politik. Temuan ini memperkaya pengembangan teori komunikasi politik dalam konteks demokrasi digital di tingkat lokal.

Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media lokal untuk merancang program literasi digital yang lebih kontekstual. Program edukasi tidak hanya perlu berfokus pada peningkatan kemampuan teknis penggunaan media digital, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, budaya verifikasi informasi, dan etika komunikasi digital. Selain itu, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin komunitas sebagai agen literasi

menjadi strategi yang relevan mengingat tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap figur-figur tersebut.

Dengan demikian, penguatan literasi digital berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan mekanisme klarifikasi informasi yang cepat merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap hoaks dan disinformasi. Upaya tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan pemilih, tetapi juga memperkuat integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika komunikasi politik serta proses pengambilan keputusan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Manado. Perkembangan media sosial sebagai ruang utama komunikasi politik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, namun pada saat yang sama juga meningkatkan kerentanan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat, manipulatif, dan tidak terverifikasi. Intensitas penyebaran informasi melalui platform digital seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram menyebabkan masyarakat semakin sering terpapar berbagai bentuk hoaks politik yang dapat membentuk persepsi publik terhadap kandidat maupun isu-isu politik tertentu. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa paparan hoaks yang terjadi secara berulang mampu memengaruhi aspek kognitif, afektif, dan konatif pemilih sehingga keputusan politik tidak sepenuhnya didasarkan pada evaluasi rasional terhadap program maupun kapasitas kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi informasi yang berkembang di ruang digital. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa hoaks telah berkembang menjadi instrumen komunikasi politik yang memiliki daya pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih dalam demokrasi digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat literasi digital merupakan faktor penting yang menentukan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi politik. Individu dengan tingkat literasi digital yang baik cenderung melakukan verifikasi terhadap sumber informasi, membandingkan berbagai referensi, serta mengevaluasi kredibilitas informasi

sebelum membentuk opini politik. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kemampuan literasi digital relatif rendah lebih mudah dipengaruhi oleh informasi yang bersifat emosional, provokatif, dan sesuai dengan preferensi politik yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai kompetensi teknis dalam penggunaan teknologi informasi, tetapi juga sebagai mekanisme protektif yang mampu mengurangi dampak negatif hoaks terhadap proses pengambilan keputusan politik.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa karakteristik sosial masyarakat Kota Manado yang masih didominasi oleh hubungan interpersonal berbasis komunitas menjadikan opinion leader memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses komunikasi politik. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin organisasi kemasyarakatan, serta figur publik lokal berperan sebagai mediator informasi yang memengaruhi penerimaan maupun penolakan masyarakat terhadap berbagai informasi politik yang beredar. Dalam konteks tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap figur tertentu sering kali lebih menentukan dibandingkan kredibilitas sumber informasi itu sendiri. Oleh karena itu, penyebaran hoaks tidak hanya dipengaruhi oleh algoritma media sosial, tetapi juga oleh struktur komunikasi sosial yang berkembang dalam masyarakat lokal.

Berdasarkan perspektif teoritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa Teori Agenda Setting, Framing, dan Two-Step Flow of Communication saling melengkapi dalam menjelaskan mekanisme pengaruh hoaks terhadap keputusan pemilih. Agenda Setting menjelaskan bagaimana isu-isu tertentu memperoleh perhatian publik melalui intensitas penyebaran informasi; Framing menjelaskan bagaimana narasi dibangun untuk mengarahkan interpretasi masyarakat terhadap kandidat atau isu politik; sedangkan Two-Step Flow of Communication menjelaskan bahwa pengaruh media berlangsung melalui perantara opinion leader yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat. Integrasi ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa perilaku memilih merupakan hasil interaksi antara paparan media digital, konstruksi pesan politik, tingkat literasi digital, dan dinamika komunikasi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi politik digital dengan menawarkan model konseptual yang menempatkan literasi digital sebagai variabel moderasi dan opinion leader sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara paparan hoaks dan keputusan pemilih. Model tersebut memperluas kajian komunikasi

politik yang selama ini lebih banyak berorientasi pada pengaruh media, dengan memasukkan dimensi budaya komunikasi lokal sebagai faktor yang turut menentukan efektivitas penyebaran informasi politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris dalam konteks Kota Manado, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai komunikasi politik digital pada berbagai konteks sosial dan budaya di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut.

1. Pertama, pemerintah daerah bersama KPU, Bawaslu, dan instansi terkait perlu mengembangkan program literasi digital yang bersifat berkelanjutan dan berbasis komunitas. Program tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan penggunaan teknologi informasi, tetapi juga pada penguatan kemampuan berpikir kritis, evaluasi sumber informasi, serta pembentukan budaya verifikasi sebelum menyebarkan informasi politik. Pendekatan berbasis komunitas menjadi penting mengingat karakteristik masyarakat Kota Manado yang masih memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap jaringan sosial lokal.
2. Kedua, lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, perlu memperluas pelaksanaan pendidikan literasi digital dan literasi politik melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. Perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat pengembangan model edukasi berbasis bukti (*evidence-based digital literacy*) yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan disinformasi pada era demokrasi digital.
3. Ketiga, penyelenggara pemilu perlu memperkuat sistem deteksi dini, klarifikasi cepat, dan komunikasi publik terhadap berbagai bentuk hoaks yang berkembang selama tahapan pemilu. Pemanfaatan teknologi digital, kerja sama dengan media massa, organisasi pemeriksa fakta, serta platform media sosial perlu terus ditingkatkan agar informasi yang benar dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih cepat dibandingkan penyebaran informasi palsu.
4. Keempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media lokal, serta opinion leader lainnya perlu dilibatkan secara aktif sebagai mitra strategis dalam program edukasi publik mengenai bahaya hoaks dan pentingnya literasi digital. Tingginya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap figur-figur tersebut menjadikan mereka memiliki posisi yang sangat efektif dalam membangun budaya komunikasi politik yang sehat, inklusif, dan berbasis fakta.

5. Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model analisis yang lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan longitudinal atau mixed methods yang lebih luas sehingga mampu menjelaskan perubahan perilaku pemilih sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pemilu. Selain itu, penelitian komparatif antarwilayah di Indonesia juga diperlukan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik sosial, budaya, dan tingkat literasi digital terhadap efektivitas penyebaran hoaks dalam berbagai konteks demokrasi lokal. Dengan demikian, pengembangan kajian mengenai hoaks, disinformasi, dan komunikasi politik tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berorientasi pada penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Association of Internet Service Providers in Indonesia. (2024). *Indonesia internet survey 2024*. APJII.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Guess, A. M., Nagler, J., & Tucker, J. A. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. *Science Advances*, 5(1), eaau4586. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586>
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan*

- penanganan hoaks dan disinformasi digital*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Laporan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1948). *The people's choice* (2nd ed.). Columbia University Press.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Nugroho, Y. (2022). Digital misinformation and democratic resilience in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(3), 401–425.
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388–402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Putra, F., & Patra, H. (2023). Analisis hoaks pada pemilu: Tinjauan dari perspektif pendidikan politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 95–102.
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "fake news": A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2023). *Guidelines for regulating digital platforms: Safeguarding freedom of expression and access to information*. UNESCO.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.
- Wibowo, K., & Prasetyo, B. (2024). Digital literacy and political participation among young voters in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 40(1), 95–114.

Wahyuni, S., & Hidayat, R. (2023). Digital literacy and susceptibility to political misinformation in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(3), 765–784.

Zannettou, S., Sirivianos, M., Blackburn, J., & Kourtellis, N. (2019). The web of false information: Rumors, fake news, hoaxes, clickbait, and various other shades of false information. *Journal of Data and Information Quality*, 11(3), 1–37.
<https://doi.org/10.1145/3309699>.